

Pemenuhan Hak Akses Pendidikan Mahasiswa melalui Kebijakan Layanan Perpustakaan Universitas Jember (UNEJ) Tahun 2025: Perspektif Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Demokrasi Pendidikan

Ramzatul Widad¹, Endang Ratna Widuwatie², Layli Suci Oktaviani³, Himayatun Nufus⁴, Muhammad Rifki S⁵, Mochammad Thoriqul F⁶

Email: 220210101075@mail.unej.ac.id, ratnaendang.sastra@unej.ac.id,
230910202022@mail.unej.ac.id, 230910202082@mail.unej.ac.id,
230910202155@mail.unej.ac.id, 240910302100@mail.unej.ac.id.

Universitas Jember

Abstrack

This study aims to examine the fulfillment of students' right to education through the 2025 library service policy of Jember University in the perspective of citizens' rights and obligations in educational democracy. This study uses a descriptive method with a qualitative approach involving 110 active student respondents from various faculties. Data were collected through an online questionnaire using Google Forms and analyzed using Miles and Huberman's interactive analysis model. The results show that the University of Jember library services have implemented the principles of educational democracy by providing easy, inclusive, and non-discriminatory access. Students gave positive assessments of the availability of book collections and digital resources (average score of 4.01 according to the respondents) as well as the professionalism and friendliness of library staff (average score of 4.06). Student awareness of their obligations to maintain facilities and comply with borrowing regulations was very high at 4.44, indicating a good sense of moral responsibility in the use of public facilities. However, student participation in providing input on service management still needs to be improved, as it scored an average of 3.73. This study shows a harmonious balance between the fulfillment of rights and the implementation of obligations within the scope of the Jember University library. All respondents considered cooperation to be important in creating a fair, democratic, and participatory

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 220210101075, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

² 196907271997022001, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

³ 230910202022, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

⁴ 230910202082, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

⁵ 230910202155, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

⁶ 240910302100, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

educational atmosphere. The function of the University of Jember library is not only as a learning resource center, but also as a democratic space that shapes the character of active, critical, and responsible citizens.

Keywords: *Right to Education, Library Services, Educational Democracy, Student Obligations, University of Jember.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak akses pendidikan mahasiswa yaitu melalui kebijakan layanan perpustakaan Universitas Jember tahun 2025 dalam perspektif hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan 110 responden mahasiswa aktif dari berbagai fakultas. Data dikumpulkan melalui kuisisioner daring menggunakan Google Form dan dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan jika layanan perpustakaan Universitas Jember telah mengimplementasikan prinsip demokrasi pendidikan melalui penyedia akses yang mudah, inklusif, dan tidak diskriminatif. Mahasiswa menilai positif terhadap ketersediaan koleksi buku dan sumber digital (data menurut hasil responden rata rata sebesar 4,01) serta profesionalitas dan keramahan petugas perpustakaan rata-rata sebesar 4,06. Kesadaran mahasiswa terhadap kewajiban menjaga fasilitas dan mematuhi peraturan peminjaman tergolong sangat tinggi yaitu sebesar 4,44 yang menunjukkan tanggungjawab moral yang baik dalam penggunaan fasilitas public. Meskipun demikian, aspek partisipasi mahasiswa dalam memberikan masukan terhadap pengelolaan layanan masih perlu ditingkatkan karena menunjukkan angka rata-rata sebesar 3,73. Penelitian ini menunjukkan adanya keseimbangan harmoni antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban dalam lingkup perpustakaan Universitas Jember. Seluruh responden menilai pentingnya kerjasama untuk menciptakan suasana pendidikan yang adil, demokratis, dan partisipatif. Fungsi dari perpustakaan Universitas Jember tidak hanya sebagai pusat sumber belajar, tapi juga sebagai ruang demokratis yang membentuk karakter warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggungjawab.

Kata kunci: Hak Pendidikan, Layanan perpustakaan, Demokrasi Pendidikan, Kewajiban Mahasiswa, Universitas Jember

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini mencakup kesempatan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak, setara, dan berkualitas. Dalam konteks pendidikan tinggi, pemenuhan hak tersebut tidak hanya diwujudkan melalui proses pembelajaran formal di ruang kelas, tetapi juga melalui penyediaan sarana penunjang seperti perpustakaan. Menurut Siregar (2019), perpustakaan perguruan tinggi berfungsi sebagai pusat sumber belajar dan pusat informasi akademik yang berperan penting dalam mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.⁷

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi wajib memiliki perpustakaan yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran, penelitian, pelestarian, dan penyebaran informasi. Ketentuan ini menjadi dasar bagi Universitas Jember (UNEJ) dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menyediakan layanan perpustakaan yang inklusif, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan akademik mahasiswa. Hal ini sejalan dengan pandangan Maryani (2020) yang menyatakan bahwa akses terhadap koleksi dan layanan perpustakaan merupakan bagian dari pemenuhan hak mahasiswa dalam pendidikan tinggi.⁸ Dengan demikian, layanan perpustakaan tidak hanya berperan sebagai fasilitas akademik, tetapi juga sebagai ruang publik pendidikan yang menjunjung nilai kesetaraan, partisipasi, dan demokrasi. Namun demikian, pemenuhan hak tersebut harus diiringi dengan kesadaran mahasiswa dalam menjalankan kewajiban mereka untuk mematuhi peraturan, menjaga fasilitas, serta memanfaatkan layanan secara bertanggung jawab.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, digitalisasi layanan perpustakaan menjadi bagian penting dari modernisasi pendidikan tinggi. Nugroho (2022) menjelaskan bahwa transformasi digital dalam perpustakaan meningkatkan efisiensi akses informasi serta memperluas jangkauan pengguna, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan literasi digital mahasiswa.⁹ Oleh karena itu, kebijakan perpustakaan Universitas Jember perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan generasi digital agar hak setiap mahasiswa terhadap akses informasi akademik dapat terpenuhi secara adil tanpa diskriminasi.

⁷ Siregar, Y. (2019). Peran Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagai Pusat Sumber Belajar. *Jurnal Kepustakawanan Indonesia*, 6(2), 98–110.

⁸ Maryani, E. (2020). Akses Informasi dan Pemenuhan Hak Mahasiswa dalam Pendidikan Tinggi Digital. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(3), 201–210.

⁹ Nugroho, A. (2022). Digitalisasi Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi. *Jurnal Informasi Digital*, 8(2), 77–90.

Dalam konteks kewarganegaraan, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang demokratis. Nauli, Elviana, dan Nelwati (2024) menegaskan bahwa harmoni antara hak dan kewajiban warga negara mencerminkan kesadaran etis dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di lingkungan akademik.¹⁰ Mahasiswa sebagai warga negara dan bagian dari komunitas akademik memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, menggunakan fasilitas secara bijak, serta turut berpartisipasi dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan layanan perpustakaan Universitas Jember (UNEJ) tahun 2025 diimplementasikan sebagai bentuk pemenuhan hak akses pendidikan mahasiswa dalam perspektif hak dan kewajiban warga negara pada era demokrasi pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keseimbangan antara hak mahasiswa dalam memperoleh akses pendidikan dan kewajiban mereka sebagai warga akademik untuk menjaga, mematuhi aturan, dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif dan demokratis.

METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Universitas Jember dengan subjek penelitian sebanyak 110 responden yang merupakan mahasiswa aktif dari berbagai fakultas. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 4-13 November 2025. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisisioner secara daring menggunakan Google Form yang dibagikan melalui aplikasi WhatsApp kepada para responden. Kuisisioner tersebut disusun berdasarkan indikator-indikator penelitian yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk menggali persepsi, pendapat, serta pengalaman mahasiswa terhadap topik yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

- Data primer diperoleh langsung dari hasil pengisian kuisisioner oleh para responden.
- Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait penelitian

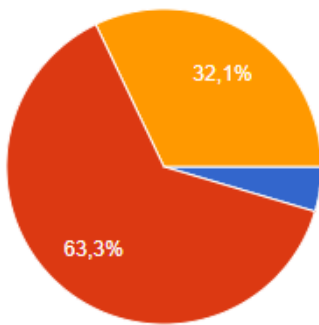
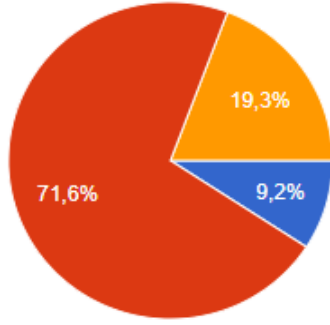
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yang dikutip dalam Sugiyono (2017:246), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

¹⁰ Nauli, Z., Elviana, N., & Nelwati, S. (2024). Kewajiban dan Hak Negara dengan Warga Negara dalam Demokrasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(3), 180–193.

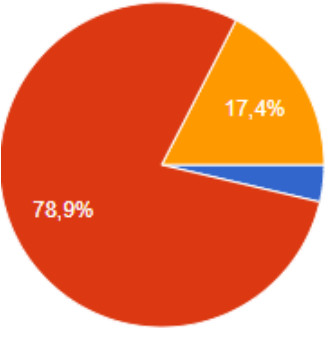
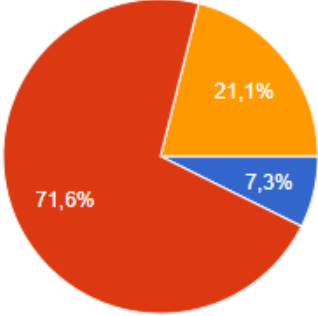
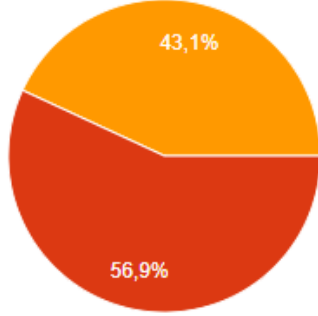
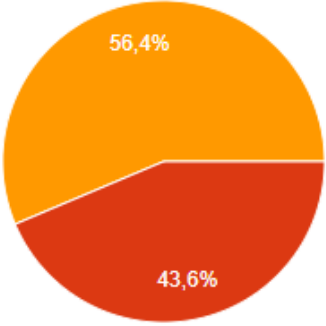
- Reduksi data, yakni proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian.
- Penyajian data, yaitu menyusun hasil data dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan interpretasi.
- Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu menafsirkan hasil analisis untuk memperoleh makna dan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian.¹¹

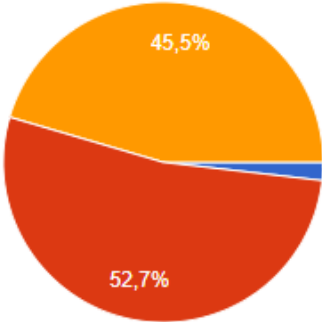
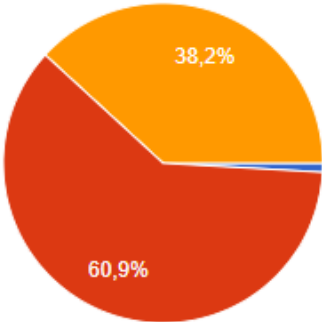
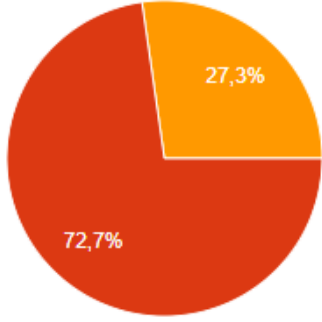
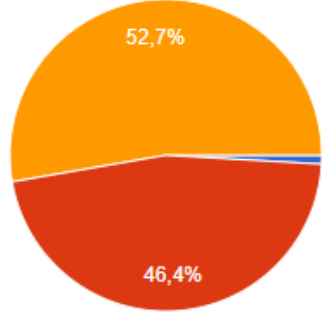
HASIL

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak akses pendidikan mahasiswa melalui kebijakan layanan perpustakaan Universitas Jember (UNEJ) ditinjau dari perspektif hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi pendidikan. Data diperoleh melalui penyebaran angket kepada mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Jember. Berdasarkan hasil olahan data terhadap 10 pernyataan yang diajukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Pernyataan	Rata-rata	Kategori	Diagram
1	Saya merasa layanan perpustakaan UNEJ mudah diakses oleh seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi	4,23	Sangat Tinggi	 ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju
2	Koleksi buku dan sumber digital di perpustakaan sudah mendukung kebutuhan akademik mahasiswa	4,01	Tinggi	 ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju

¹¹ Milles dan Huberman, (2017). Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 246.

3	Kebijakan kampus tentang layanan perpustakaan sudah mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa	4,10	Tinggi	 ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju
4	Petugas perpustakaan memberikan pelayanan yang ramah dan profesional	4,06	Tinggi	 ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju
5	Saya mematuhi peraturan perpustakaan, termasuk ketepatan waktu pengembalian buku	4,44	Sangat Tinggi	 ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju
6	Saya merasa berkewajiban menjaga fasilitas dan kebersihan area perpustakaan	4,27	Sangat Tinggi	 ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju

7	Mahasiswa memiliki kesempatan untuk memberikan masukan terhadap pengelolaan layanan perpustakaan	3,73	Tinggi	 ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju
8	Layanan perpustakaan mencerminkan prinsip kesetaraan akses bagi seluruh mahasiswa	4,17	Tinggi	 ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju
9	Pemenuhan hak mahasiswa atas layanan perpustakaan sudah seimbang dengan kewajiban mereka sebagai pengguna	4,13	Tinggi	 ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju
10	Kerjasama antara mahasiswa dan pihak kampus penting untuk menciptakan layanan pendidikan yang adil dan demokratis	4,33	Sangat Tinggi	 ● Tidak Setuju ● Setuju ● Sangat Setuju

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan perpustakaan Universitas Jember telah berjalan dengan baik dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi pendidikan, terutama dalam hal

kesetaraan akses, profesionalitas pelayanan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengguna. Nilai rata-rata yang tinggi pada indikator aksesibilitas, yaitu 4,23, menegaskan bahwa mahasiswa merasa mudah memperoleh layanan tanpa adanya diskriminasi. Hal ini membuktikan bahwa perpustakaan UNEJ telah menerapkan prinsip kesetaraan hak dalam memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.¹² Kemudahan akses yang dirasakan mahasiswa juga mencerminkan komitmen lembaga terhadap penyediaan fasilitas publik yang inklusif bagi seluruh civitas akademika.

Sementara itu, indikator mengenai koleksi buku dan sumber digital memperoleh nilai 4,01 (Tinggi). Hasil ini mengindikasikan bahwa ketersediaan sumber pustaka sudah cukup memenuhi kebutuhan akademik mahasiswa. Namun, responden menilai perlu adanya peningkatan dalam hal relevansi dan keberagaman koleksi digital agar lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini sejalan dengan pandangan Supriyanto (2020) yang menekankan pentingnya pembaruan koleksi secara berkala agar perpustakaan mampu menunjang proses pembelajaran yang bermutu.¹³

Kebijakan layanan perpustakaan memperoleh skor 4,10, menunjukkan bahwa mahasiswa menilai kebijakan yang berlaku sudah memperhatikan kebutuhan pengguna, namun belum sepenuhnya melibatkan mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks demokrasi pendidikan, hal ini menandakan perlunya penguatan aspek partisipatif agar mahasiswa dapat turut berkontribusi dalam pengelolaan layanan publik kampus. Habermas (1996) dalam teori demokrasi deliberatif menegaskan bahwa partisipasi aktif warga dalam perumusan kebijakan publik merupakan bentuk nyata dari demokrasi substantif, di mana setiap individu memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi.¹⁴

Selanjutnya, pelayanan petugas perpustakaan yang memperoleh skor 4,06 (Tinggi) menunjukkan bahwa mahasiswa menilai petugas memberikan layanan yang ramah dan profesional. Profesionalitas petugas menjadi kunci utama dalam membangun pengalaman positif pengguna layanan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Tilaar (2002) yang menyatakan bahwa demokrasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan akses, tetapi juga menyangkut pelayanan yang humanis dan menghormati peserta didik sebagai subjek pendidikan.¹⁵

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.). Sekretariat Negara Republik Indonesia.

¹³ Supriyanto, W. (2020). Manajemen perpustakaan perguruan tinggi: Strategi pengembangan layanan berbasis teknologi informasi. Pustaka Pelajar.

¹⁴ Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.

¹⁵ Tilaar, H. A. R. (2002). Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia. PT Remaja Rosdakarya.

Kepatuhan terhadap peraturan perpustakaan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 4,44 (Sangat Tinggi), yang menandakan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran tinggi dalam menjalankan kewajiban mereka. Ketaatan terhadap aturan, ketepatan waktu pengembalian buku, serta kepedulian terhadap fasilitas publik mencerminkan tanggung jawab moral yang tinggi. Hal ini mendukung konsep warga negara yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh Somantri (2017), yaitu individu yang mampu menyeimbangkan hak dan kewajibannya dalam kehidupan sosial.¹⁶

Kesadaran mahasiswa dalam menjaga fasilitas perpustakaan juga tergolong sangat baik dengan skor 4,27 (Sangat Tinggi). Sikap ini mencerminkan partisipasi aktif mahasiswa dalam menjaga fasilitas bersama, yang merupakan wujud tanggung jawab kolektif terhadap ruang publik pendidikan. Namun, indikator mengenai kesempatan mahasiswa memberikan masukan terhadap pengelolaan layanan memperoleh skor 3,73 (Tinggi tetapi relatif rendah). Hal ini menunjukkan bahwa aspek partisipasi mahasiswa masih belum optimal. Pihak kampus dapat memperkuat aspek ini dengan menyediakan mekanisme umpan balik seperti survei kepuasan, forum diskusi, atau keterlibatan organisasi mahasiswa dalam kegiatan pengembangan layanan.

Selain itu, indikator kesetaraan akses memperoleh nilai 4,17 (Tinggi), yang menegaskan bahwa perpustakaan telah menciptakan suasana layanan yang adil tanpa pembedaan berdasarkan fakultas, jurusan, maupun latar belakang sosial. Sementara indikator keseimbangan hak dan kewajiban pengguna memperoleh nilai 4,13 (Tinggi), menandakan bahwa mahasiswa merasa hak mereka dalam memperoleh layanan telah diimbangi dengan kewajiban menjaga ketertiban dan fasilitas. Kedua indikator ini menunjukkan bahwa sistem layanan perpustakaan telah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan distributif, di mana setiap mahasiswa memperoleh hak yang sama dan memiliki tanggung jawab yang setara.

Indikator terakhir, yaitu kerja sama antara mahasiswa dan pihak kampus, memperoleh nilai 4,33 (Sangat Tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memahami pentingnya kolaborasi untuk menciptakan layanan pendidikan yang demokratis. Sinergi antara pihak kampus sebagai penyelenggara dan mahasiswa sebagai pengguna menjadi fondasi penting bagi terciptanya pelayanan publik yang berkeadilan dan partisipatif.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan perpustakaan Universitas Jember telah mencerminkan prinsip demokrasi pendidikan melalui keseimbangan antara hak akses, tanggung jawab pengguna, serta profesionalitas pengelola layanan. Meski demikian,

¹⁶ Somantri, M. N. (2017). Civic education: Pendidikan kewarganegaraan untuk demokrasi. PT Remaja Rosdakarya.

perlu penguatan pada aspek partisipasi mahasiswa agar demokrasi pendidikan dapat terwujud secara lebih menyeluruh, tidak hanya dalam bentuk akses, tetapi juga dalam keterlibatan nyata mahasiswa sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dan pengelolaan layanan kampus.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa layanan perpustakaan Universitas Jember telah berhasil mengimplementasikan prinsip demokrasi dalam pendidikan melalui keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban mahasiswa. Perpustakaan Universitas Jember memenuhi hak pendidikan mahasiswa dengan menyediakan akses yang mudah, inklusif, dan tidak diskriminatif dengan ketersediaan berbagai koleksi buku dan sumber digital untuk mendukung kebutuhan akademik mahasiswa.

Mahasiswa menunjukkan kesadaran yang baik terhadap kewajiban menjaga kebersihan, merawat fasilitas serta mematuhi peraturan peminjaman dan pengembalian buku. Mahasiswa sadar bahwa mereka bukan hanya penerima layanan, tapi juga memiliki tanggungjawab menjaga keberlanjutan fasilitas pendidikan, hal ini merupakan hubungan timbal balik yang harmonis.

Adanya ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan saran menunjukkan pengelolaan perpustakaan yang bersifat partisipatif dan demokratis. Dengan demikian, Perpustakaan Universitas Jember tidak hanya menjadi pusat sumber belajar, tapi juga sebagai ruang demokratis untuk membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.). Sekretariat Negara Republik Indonesia.

ARTIKEL JURNAL

Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.

Maryani, E. (2020). Akses informasi dan pemenuhan hak mahasiswa dalam pendidikan tinggi digital. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(3), 201-210.

Milles, & Huberman. (2017). *Analisis data kualitatif*. Universitas Indonesia Press.

Nauli, Z., Elviana, N., & Nelwati, S. (2024). Kewajiban dan hak negara dengan warga negara dalam demokrasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(3), 180-193.

Nugroho, A. (2022). Digitalisasi layanan perpustakaan perguruan tinggi. *Jurnal Informasi Digital*, 8(2), 77-90.

Siregar, Y. (2019). Peran perpustakaan perguruan tinggi sebagai pusat sumber belajar. *Jurnal Kepustakawanan Indonesia*, 6(2), 98-110.

Somantri, M. N. (2017). Civic education: Pendidikan kewarganegaraan untuk demokrasi. PT Remaja Rosdakarya.

Supriyanto, W. (2020). *Manajemen perpustakaan perguruan tinggi: Strategi pengembangan layanan berbasis teknologi informasi*. Pustaka Pelajar.

Tilaar, H. A. R. (2002). *Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia*. PT Remaja Rosdakarya.